

IMPLEMENTASI JANJI POLITIK ANGGOTA DPRD DAN KONSTITUEN DI MASYARAKAT KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR

IMPLEMENTATION OF POLITICAL PROMISES BY DPRD MEMBERS AND CONSTITUENTS IN THE EAST BANJARMASIN SUB-DISTRICT COMMUNITY

Putri Maulia Sari, Iswiyati Rahayu, Dewi Merdayanty

Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al
Banjari Banjarmasin, NIM19120365

Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al
Banjari Banjarmasin, NIDN1122106501

Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al
Banjari Banjarmasin, NIDN1104017302

Email : putri.mauliasari@gmail.com

ABSTRAK

Pemilu atau Pilkada lebih sebagai suatu ritual sosial daripada momen politik untuk mengubah nasib atau memperjuangkan cita-cita. Oleh karena itu pertanggungjawaban sosial dan etika menjadi hukum yang wajib antara politisi dan konstituen memiliki hubungan mutualisme politik. Politisi pemangku kebijakan partai politik adalah mereka yang duduk di parlemen, kementerian bahkan presiden. Tanggungjawab sosial bisa dilakukan dengan pendekatan secara individu maupun masyarakat lokal. Secara etis, perlu membangun kesadaran moral akan hak individu dan hak publik.

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder berupa wawancara dengan informan dan dokumen-dokumen yang terkait. Teknik analisis data berlangsung secara simultan yang dilakukan dengan proses pengumpulan data dengan alur atau tahapan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi antara konstituen dan anggota perwakilan DPRD di Kecamatan Banjarmasin Timur belum dilaksanakan secara efisien hal ini disebabkan karena masih ada kendala sumber daya struktur organisasi, komunikasi dan disposisi yang belum mendukung untuk terlaksananya reses secara anggota DPRD komisi 1 dengan konstituen. Kendala implementasi anggota DPRD dengan konstituen di Kecamatan Banjarmasin Timur adalah dari sisi sumber daya manusia yang belum memiliki Pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan peningkatan reses antara anggota DPRD dikomisi 1 dengan konstituen atau masyarakat. Solusi yang diterapkan untuk mengatasi kendala implementasi anggota DPRD konstituen di Kecamatan Banjarmasin Timur adalah dari sisi sumber daya manusia diperlukan Pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan peningkatan reses antara anggota DPRD dikomisi 1 dengan konstituen atau masyarakat.

Saran-saran oleh peneliti: 1). Diharapkan untuk implementasi janji politik anggota DPRD dan konstituen di Kecamatan Banjarmasin Timur adanya delegasi untuk mengisi kekosongan struktur birokrasi dan komunikasi yang sering terhambat dengan adanya pendelegasian maka diharapkan kegiatan reses dapat berjalan dengan baik. 2). Diharapkan dapat menemukan adanya komunikasi yang terhambat antara anggota DPRD komisi 1 dan konstituen dalam melaksanakan reses oleh sebab itu kondisi komisi 1 perlu menyesuaikan jadwal dengan masyarakat sehingga pertemuan reses dapat dilaksanakan.

Kata Kunci : Anggota DPRD dan Konstituen, Implementasi, Janji Politik, Masyarakat

ABSTRACT

Elections or Pilkada are more a social ritual than a political moment to change fate or fight for ideals. Therefore, social and ethical responsibility becomes a mandatory law between politicians and constituents having a relationship of political mutualism. Politicians who hold political party policies are those who sit in parliament, ministries and even the president. Social responsibility can be carried out with an individual or local community approach. Ethically, it is necessary to build moral awareness of individual rights and public rights.

The method used by researchers is a qualitative approach with a descriptive research type. Sources of data used are primary data and secondary data in the form of interviews with informants and related documents. Data analysis techniques take place simultaneously which is carried out by the process of collecting data with flows or stages.

The results of the study show that the implementation between constituents and DPRD representative members in East Banjarmasin District has not been carried out efficiently. This is because there are still constraints on organizational structure, communication and disposition resources that have not supported the implementation of recess as DPRD commission 1 members with constituents. The obstacle to implementing DPRD members with constituencies in East Banjarmasin District is in terms of human resources who do not have education and training related to increasing recess between DPRD members in commission 1 and constituents or the community. The solution implemented to overcome the constraints on the implementation of constituent DPRD members in East Banjarmasin District is that from a human resource perspective, education and training are needed related to increasing recess between DPRD members in commission 1 and constituents or the community.

Suggestions by researchers: 1). It is hoped that for the implementation of the political promises of DPRD members and constituents in the East Banjarmasin District there will be a delegation to fill the void in the bureaucratic structure and communication which is often hampered by delegation, it is hoped that recess activities can run well. 2). It is expected to find that there is an obstacle to communication between Commission 1 DPRD members and constituents in carrying out the recess, therefore the condition of Commission 1 needs to adjust the schedule with the community so that recess meetings can be held.

Keywords : *Members of DPRD and Constituents, Implementation, Political Promises, Society*

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin Maharani Fatmawati. (2014). "Realisasi Janji Kampanye Program Kesehatan Bupati Semarang Periode 2010-2015". Jurnal Ilmu Pemerintahan. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Dede Sri Kartini, et.al. (2017). "Konsistensi Antara Program Partai Dengan Kebijakan Publik Di Kabupaten Bandung (2011—2015)". CosmoGov. Volume 1 Nomor 2. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Universitas Padjajaran. Bandung.
<https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11842>.
- Huda, Khoi, and Fadhlika dan Zulfa Azzah. (2019). "Pemilu Presiden 2019 : Antara Kontestasi Politik Dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa.Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Pesta". Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 547 Khoiril Huda, Zulfa 'Azzah Fadhlika Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018, 547-562: 547–62.
- Hyginus Suseno TW dan Nicko Kornelius Putra. (2014). "Persepsi Publik Perkotaan Terhadap Janji Politik Caleg Menurut Faktor Budaya, Sosial, Pribadi, Dan Psikologis". Jurnal Penelitian. Universitas Negeri Semarang. Volume 18 Nomor 1.
- Liando, Daud M. (2016). "PEMILU DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Manado." Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum 3: 14–28.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/17190>.

